

BAB V

KESIMPULAN

Pembentukan ASC sebenarnya diharapkan tidak menjadi suatu "rezim keamanan," yaitu ketika niat untuk meninggalkan mesin perang masih diwarnai dengan logika perimbangan kekuatan militer (*balance of power*) atau kemampuan untuk menandingi senjata lawan. Suatu masyarakat keamanan yang dicita-citakan ASC justru mendasarkannya pada kesamaan kepentingan jangka panjang antara negara-negara dalam kawasan Asia Tenggara.

Tentu tidak mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun demikian, sebenarnya potensi untuk itu telah tersedia, tentu saja dengan memperhatikan konteks geografis dan tradisi serta kebiasaan kerja sama ASEAN. Beberapa prinsip, misalnya untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masih tetap dapat dipertahankan, meski prinsip itu perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan baru dan tantangan di kemudian hari. Mungkin saja prinsip itu dapat diperlonggar untuk masalah-masalah domestik yang membawa konsekuensi keamanan di negara lain dan atau yang bertentangan dengan norma-norma internasional.

Namun, idealisme diatas tidak dapat sepenuhnya bisa terpenuhi jika sudah bersinggungan dengan kepentingan dalam negeri suatu negara. Penandatanganan *ASEAN Security Community* dalam Bali Concord II oleh Singapura bisa dianggap

... yang bertentangan dengan standar ganda. Singapura menerapkan standar ganda

tersebut dalam rangka agar masih tetap mendapatkan tempat bagi negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia karena Singapura tidak mungkin lepas dari kerjasama-kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dengan negara-negara tersebut. Jika Singapura melepaskan diri dari kerjasama tersebut maka kerugian bagi Singapura bahwa Singapura terkucilkan dalam pergaulan regional Asia Tenggara karena wilayah teritorial Singapura berada di Asia Tenggara.

Kerjasama Singapura dengan negara-negara ASEAN juga memiliki keinginan untuk dapat berperan dalam pertahanan dan keamanan di Asia Tenggara, khususnya di Selat Malaka, karena Selat Malaka merupakan aset jalur perdagangan dunia yang sangat penting bagi jalur ekonomi dan keamanan Singapura. Oleh karena itu, Singapura mencoba tetap membangun basis-basis kerjasama tidak hanya dengan negara-negara ASEAN terutama Indonesia dan Malaysia (seperti dalam *ASEAN Security Community*) yang bersinggungan langsung dengan teritorial Selat Malaka, akan tetapi juga dengan Amerika Serikat.

Kerjasama dengan mendukung rencana pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kelangsungan kepentingan nasional Singapura sendiri. Dengan melakukan kerjasama dengan Amerika maka Singapura akan merasa lebih aman karena Amerika merupakan mitra kerjasama yang sangat membantu Singapura tidak saja keamanan wilayah dari terorisme yang dianggap mengancam wilayah teritorial Singapura akan tetapi juga

perdagangan internasional merupakan timbal balik atas kepentingan ekonomi Amerika yang juga menggunakan jalur Selat Malaka sebagai jalur perdagangannya.

Singapura menganggap bahwa kerjasama ASC sebagai sesuatu kerjasama regional bukan merupakan suatu ikatan yang dapat memenuhi kepentingan pemerintahan Singapura yang memiliki kepentingan tersendiri di wilayah Selat Malaka. Pada tataran operasional bahwa baik ARF maupun ASC dianggap hanya diatas kertas saja, namun bila sudah diturunkan ke tingkat operasional di lapangan maka yang berbicara adalah kepentingan nasional Singapura.

Asumsi kepentingan nasional Singapura tersebut diperkuat dengan, bahwa *ASEAN Regional Forum* tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum (*legally binding*) sehingga *ASEAN Security Community* akan menghadapi berbagai kendala dalam tahap operasionalnya di lapangan.

Singapura menganggap bahwa potensi ketidaksesuain dalam kerjasama regional ditambah dengan kecenderungan perbedaaan ideologis diantara negara-negara yang berbatasan dengan Selat Malaka seperti Indonesia dan Malaysia membawa pada perilaku *security deterence* politik rasional Singapura. Bahwasanya Singapura tidak ingin didikte kedua tetangganya tersebut